BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kantor Pelayanan Pajak

4.1.1 Sejarah Kantor Pelayanan Pajak

Sejarah kantor pajak di Indonesia diawali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan pemungutan pajak dari rakyat di wilayah pasundan, dibentuk suatu badan yang bernama Inspeksi Keuangan untuk seluruh Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Garut, Ciamis, dan Banjar. Khusus untuk Inspeksi Keuangan Bandung bertempat tinggal di Gedung Concordia yang sekarang dikenal dengan Gedung Merdeka yang pada waktu itu terletak di Jalan Raya Barat sedangkan pada masa sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika Bandung.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 270/KMK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh kantor inspeksi pajak di Indonesia berganti nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Untuk wilayah Bandung sendiri dibentuk empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan pembagian batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees.
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega.
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara.
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi.

Dalam perkembangannya kemudian, sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka pelaksanaan modernisasi

sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan *good governance* dan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 ditetapkanlah keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 yang mengatur tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak tersebut maka terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang telah menerapkan Sistem Administrasi Modern dinyatakan resmi berdiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan Kantor Pelayanan Pajak pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang berkantor di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung dan masih berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees. Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur secara geografis dan administratif berada di bawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I yang berkedudukan di Bandung. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Cianjur di bentuk berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.276/KMK/.01/1989, tanggal 25 Maret 1989 dengan kriteria Type B, yang pada saat itu bernama Kantor Inpeksi Pajak (KIP) Cianjur.

Dengan perkembangan tugas yang semakin bertambah seiring meningkat dan meluasnya potensi ekonomi Kabupaten Cianjur maka dalam rangka reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak tahun 1997 maka di bentuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur, dimana wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) cianjur adalah meliputi seluruh wilayah administrasi kabupaten daerah tingkat II Cianjur seluas 350.148 ha, yang terdiri dari 24 kecamatan dan 2 kemantren.

Pada tahun 1993 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur mendapat dana untuk pembelian tanah seluas 3850 M2 di Jl. Arief Rahman Hakim No 55 Cianjur. Pada tahun 1996 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur mendapat dana lagi untuk proyek pembangunan gedung, dan sejak tahun itu bangun gedung Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Ciajur berlantai II dengan luas bangunan 1900 M^2.

Gedung tersebut selesai di bangun pada bulan Oktober 1997 dan di resmikan oleh Direktur Jenderal Pajak Dr. Fuad Bawazier pada tanggal 24 November 1997. Semenjak itu seluruh kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cianjur dilakukan dalam satu gedung dengan alamat Jl. Arief Rahman Hakim No. 55 Cianjur. Dan pada awal bulan September tahun 2007, Direktur Jenderal Pajak mencetus untuk menggabungkan Kantor Palayanan Pajak (KPP) dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi kantor Pelayanan

Pajak Pratama Cianjur dan bertempat dalam satu gedung yaitu di Jl. Raya Bandung KM 3 Cianjur.

Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta berdiri pada tanggal 1 April 1989, yang terbentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor : KEP. 276/KMK.01/1989 tanggal 25 Maret 1989 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat di Bandung.

Kantor ini sebelumnya merupakan Kantor Dinas Luar Tingkat I yang beralamat di Jalan Veteran Purwakarta yang merupakan bagian dari Kantor Inspeksi Pajak (KIP) Karawang yang beralamat di Jalan A. Yani Karawang, dan Wilayah kerja KIP Karawang meliputi Daerah Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI , Kantor Inspeksi Pajak Karawang (KIP) dipecah menjadi 3 Kantor Pelayanan yaitu :

Kantor Pelayanan Pajak Bekasi yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Bekasi.

Kantor Pelayanan Pajak Karawang yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten Karawang.

Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta yang wilayah kerjanya meliputi Kabupaten II Purwakarta dan Kabupaten Subang .

Pada awal tahun 1990 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Purwakarta berlokasi di Jalan Kol. Kornel Singawinata no. 78 Purwakarta berupa gedung Kantor berstatus sewa, dan pada tanggal 17 Januari 1997 Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta menempati gedung kantor sendiri yang beralamat di Jalan Ir.

Juanda No. 1 Ciganea Bunder Purwakarta, bangunan tersebut berada satu atap dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Purwakarta (satu Gedung dua Kantor).

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan RI. Nomor 443/KMK.01/2001 tanggal 23 Juli 2001,Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta di bawah Wilayah Kerja Kantor Wilayah DJP Jawa Barat Bagian II Bandung.

Pada tahun 2004 terjadi reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP / KP.PBB) Purwakarta, masuk ke Kantor Wilayah DJP Jawa Bagian Barat III Bekasi.

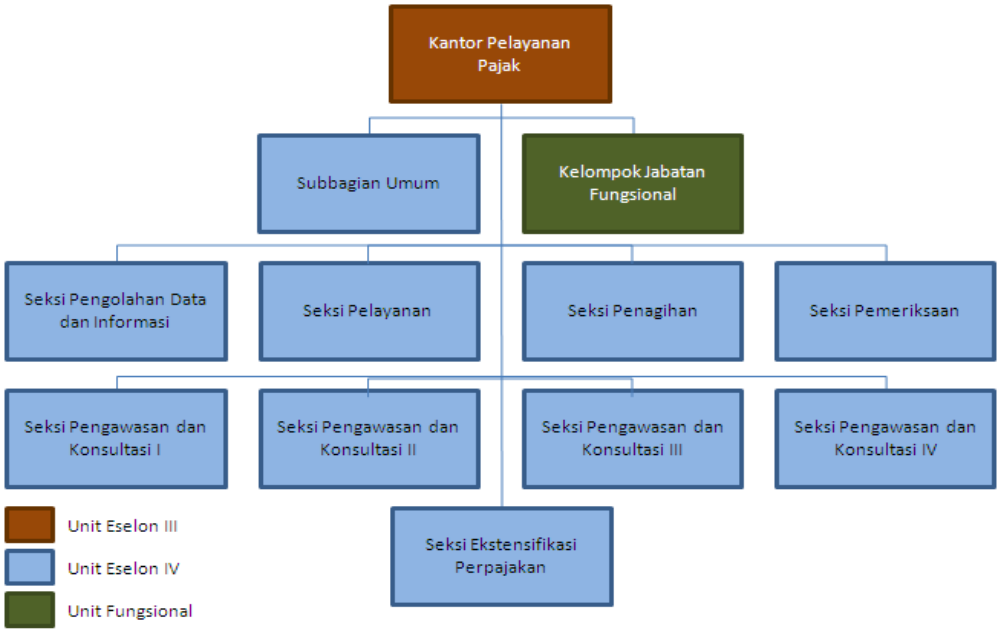
Pada tahun 2007 terjadi kembali re - Organisasi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I Bandung.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI tanggal 28 Agustus 2007, Kantor Pelayanan Pajak Purwakarta, KP.4 Subang dan Kantor Pelayanan PBB Purwakarta digabungkan, berubah nama menjadi ‘KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PURWAKARTA‘, dan telah diresmikan pada tanggal 5 September 2007, di Bandung.

4.1.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak

Organisasi adalah sistem kerjasama dari dua orang atau lebih untuk dapat memungkinkan tercapainya tujuan bersama dengan adanya pembagian tugas dan tanggung jawab. Suatu sistem organisasi yang baik sangat diperlukan untuk menciptakan suatu koordinasi dalam suatu usaha. Organisasi menempatkan dan

mengatur orang-orang dan pekerjaan pada tempat dan kegunaanya masing-masing.



Gambar 4.1
Struktur Organisasi KPP

Struktur organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak merupakan suatu bentuk organisasi Garis dan Staf dimana sebagai pimpinan tertinggi adalah Kepala Kantor, artinya dalam hal ini Kepala Kantor sebagai pemimpin yang memberikan dan melimpahkan wewenang secara vertikal kepada bawahannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sedangkan bentuk pelaksanaannya Kepala Kantor dibantu oleh sub bagian umum dan beberapa seksi.

4.1.3 Uraian Tugas

1. Kepala Kantor, mempunyai tugas :

Selain memimpin dan mengkoordinir seluruh pekerja kantor, juga melaksanakan kegiatan :

a. Penyuluhan

b. Pelayanan, dan
c. Pengawasan di bidang Pemeriksaan dan Penagihan
d. Bertanggung jawab terhadap tugas dan memiliki kewenanganuntuk memajukan Kantor Pelayanan Pajak

2. Subbagian Umum, mempunyai tugas:
a. Melakukan urusan kepegawaian,
b. Melakukan urusan Keuangan,
c. Melakukan urusan tata usaha,
d. Melakukan urusan rumah tangga.

3. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
a. Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran,
b. Melakukan urusan pemindahan dan pencabutan identitas wajib pajak,
c. Melakukan urusan penerimaan dan penelitian surat pemberitahuan (SPT) dan surat pajak lainnya,
d. Melakukan urusan kearsipan berkas wajib pajak serta penerbitan surat-surat ketetapan pajak.

4. Seksi Pengolahan Data dan Informasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Mempunyai tugas melakukan urusan perekaman,
b. Mempunyai tugas melakukan pengolahan data,
c. Mempunyai tugas menganalisis dan penyajian informasi perpajakan.

5. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan, mempunyai tugas sebagai berikut:
a. Melakukan urusan penetapan,
b. Melakukan urusan instensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan,

c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

6. Seksi Penagihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan urusan tata usaha piutang pajak,
b. Melakukan urusan penagihan dan pembuatan usul penghapusan piutang Perpajakan,
c. Melakukan urusan penetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

7. Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan pemeriksaan rutin,
b. Mempunyai tugas menatausahakan dan mengusulkan penerbitan SP3,
c. Melakukan pemeriksaan lapangan oleh Fungsional Pemeriksa, serta
d. Merekam Nota Hitung.

8. Seksi Pengawasan dan Konsultasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya,
b. Melaksanakan penelitian dan analisa kepatuhan Wajib Pajak,
c. Penyusunan nota perhitungan, dan sebagai
d. Alat konsultasi perpajakan bagi Wajib Pajak.

9. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa & Penilai, mempunyai tugas:

Melakukan pemeriksaan atas kewajiban perpajakam, baik pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan khusus sesuai penugasan dari Kepala Kantor. Fungsional Penilai PBB bertugas melakukan penilaian atas objek PBB yang ada di wilayah KPP Pratama Sumedang, baik massal maupun individual

4.1.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak

Tujuan dari Kantor Pelayanan Pajak yaitu memberikan pelayanan publik dengan baik kepada Wajib Pajak, dengan memenuhi semua kebutuhan Wajib Pajak untuk dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan Prosedur dan tata kerja organisasi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung aktivitas-aktivitas yang dijalankan antara lain:

1. Pelayanan terhadap Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan melalui prosedur yang mudah dan sistematis.
2. Melakukan kegiatan Operasional perpajakan di bidang pengolahan data informasi, tata usaha perpajakan, pelayananan, penagihan, pengawasan dan konsultasi, dan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
3. Kegiatan pengawasan dan verifikasi atas pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dan penerapan sanksi administrasi perpajakan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, data maupun, keterangan lain, dalam rangka pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan. Juga melakukan kegiatan penata usahaan dan lampirannya termasuk kebenaran penulisan dan perhitungan yang bersifat formal, pemantauan dan penyusunan laporan pembayaran masa PPh, PPN, PBB, BPHTB, dan Pajak tidak langsung lainnya.
4. Mengadakan Kegiatan penyuluhan pajak kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakanya.

4.2 Karakteristik Responden

Data responden yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dari penelitian ini adalah sebanyak 30 responden. Jumlah ini diambil berdasarkan jumlah kuesioner yang disebar ke seluruh KPP, artinya semua kuesioner kembali.

Data mengenai karakteristik responden sebagai berikut:

4.2.1 Profil Responden Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan umur dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut:

Tabel 4.1
Profil Responden Berdasarkan Umur

Umur	Jumlah Responden	Persentase
20-25 tahun	8	26,67%
26-30 tahun	12	40%
31-35 tahun	4	13,33%
36-40 tahun	4	13,33%
>40 tahun	2	6,67%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.1 dapat diketahui bahwa responden yang berusia 20-25 tahun berjumlah 8 orang atau sebesar 26,67%, 26-30 tahun berjumlah 12 orang atau sebesar 40%, 31-35 tahun berjumlah 4 orang atau sebesar 13,33%, 36-40 tahun sebesar 4 orang sebesar 13,33%, Diatas 40 tahun berjumlah 2 orang atau sebesar 6,67%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berusia 26-30 tahun. Hal ini disebabkan kuisioner yang dibagikan kepada pegawai pajak bagian Pengolahan Data dan Informasi untuk menilai sistem informasi dan kebijakan pajak lebih banyak berumur 26-30 tahun atau sebesar 40%.

4.2.2 Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan pendidikan terakhirdapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.2
Profil Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir

Pendidikan Terakhir	Jumlah Responden	Persentase
SMA atau sederajat	3	10%
Diploma	21	70%
Sarjana	6	20%
Pasca Sarjana	0	0
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.2 dapat diketahui bahwa responden dengan pendidikan terakhir SMA atau sederajat berjumlah 3 orang atau sebesar 10%, diploma berjumlah 21 orang atau sebesar 70%,dan responden dengan pendidikan terakhir sarjana berjumlah 6 orang atau sebesar 20%. Jadi dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini berpendidikan terakhir sarjana.

4.2.3 Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan lama bekerja dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3
Profil Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja	Jumlah Responden	Persentase
s/d 1 tahun	7	23,33%
1-3 tahun	13	43,33%
3-5 tahun	6	20%
>5 tahun	4	13,34%
Jumlah	30	100%

Berdasarkan tabel 4.3 dapat diketahui bahwa responden dengan lama bekerja s/d 1 tahun berjumlah (7) orang atau sebesar (23,33%), responden dengan lama kerja 1–3 tahun sebanyak 13 orang atau sebesar 43,33% dan responden

dengan lama kerja 3–5 tahun sebanyak 6 orang atau sebesar 20%, dan responden dengan lama kerja lebih dari 5 tahun sebanyak 4 orang atau sebesar 13,34%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden pada penelitian ini dengan lama kerja paling banyak antara 1 s/d 3 tahun.

4.3 Analisis Deskriptif

Gambaran data hasil tanggapan responden dapat digunakan untuk memperkaya pembahasan, melalui gambaran data tanggapan responden dapat diketahui bagaimana kondisi setiap indikator variabel yang sedang diteliti. Agar lebih mudah dalam menginterpretasikan variabel yang sedang diteliti, dilakukan kategorisasi terhadap skor tanggapan responden.

4.3.1 Analisis Deskriptif Sistem Informasi

Pada penelitian ini sistem informasi diukur menggunakan 11 (sebelas) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 22 butir pernyataan. Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang sistem informasi pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Imaka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.4
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Sistem Informasi

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	*Output*	226	300	75,33	Baik
2	Pengolahan	218	300	72,67	Baik
3	*Input*	220	300	73,33	Baik
4	Sistem Operasi	223	300	74,33	Baik
5	Perangkat Lunak Aplikasi	215	300	71,67	Baik
6	Pengguna Sistem Informasi	228	300	76	Baik
7	Aktivitas	225	300	75	Baik

8	Fungsi	241	300	80,33	Baik
9	Media Penyimpanan Data	191	300	63,67	Cukup
10	Sistem Pengolahan	213	300	71	Baik
11	Jaringan Berdasarkan Geografi	220	300	73,33	Baik
	Total	**3141**	**3300**	**73,33**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Pada tabel 4.4 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel sistem informasi sebesar 73,33% berada di antara interval 68,01–84,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sistem informasipada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum sudahbaik. Persentase tertinggi terdapat pada indikator fungsi, yaitu sebesar 80,33% yang berarti termasuk ke dalam kategori baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada indikator media penyimpanan data, yaitu sebesar 63,67% yang berarti termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Agar lebih jelas penulis juga akan menyajikan tanggapan responden mengenai sistem informasipada masing-masing dimensi, yang diukur menggunakan 6 (enam) dimensi, 11 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 22 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing dimensi.

4.3.1.1 Dimensi *Hardware*

Dimensi *hardware* dibagi menjadi 3 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi6butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi *hardware*.

Tabel 4.5

Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Hardware*

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Output	1	*Output* yang dihasilkan monitor	F	0	0	8	16	6	78,7
			%	0	0	26,67	53,33	20	
	2	*Output* yang dihasilkan *printer*	F	0	1	12	15	2	72
			%	0	3,33	40	50	6,67	
Total Skor *Output*									**75,35**
Pengolahan	3	Sistem nyaman dalam kondisi CPU	F	0	2	12	12	4	72
			%	0	6,67	40	40	13,33	
	4	Kecepatan CPU	F	0	0	12	16	2	73,33
			%	0	0	40	53,33	6,67	
Total Skor Pengolahan									**72,67**
Input	5	Kesesuaian *Hardware Input (Mouse)*	F	0	0	16	12	2	70,67
			%	0	0	53,33	40	6,67	
	6	Kesesuaian *Hardware Input (Keyboard)*	F	0	0	10	16	4	76
			%	0	0	33,33	53,33	13,34	
Total Skor *Input*									**73,34**
Total Skor Dimensi *Hardware*									**73,78**

Pada tabel 4.5 dapat dilihat paling banyak responden menilai bahwa *output* yang dihasilkan monitor sudah baik, yaitu sebesar 53,33%, kemudian ada sebanyak 26,67% responden yang menilai bahwa *output* yang dihasilkan monitor cukup baik. Persentase skor jawaban responden sebesar 78,7% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk *output* yang dihasilkan *printer,* paling banyak responden menilai bahwa *output* yang dihasilkan *printer* sudah baik, yaitu sebesar 50%, kemudian ada sebanyak 40% responden yang menilai bahwa *output* yang dihasilkan *printer* cukup baik. Persentase skor jawaban responden untuk *output* yang dihasilkan *printer* sebesar 72% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase indikator *output* sebesar 75,35% memberikan gambaran bahwa *output* yang dihasilkan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

Mengenai indikator pengolahan dapat dilihat responden yang merasa nyaman dengan kondisi CPU berjumlah sama antara yang memilih cukup baik dan baik, yaitu sebesar 40%.Persentase skor jawaban responden sebesar 72% berada pada interval 68,01–84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan mengenai kecepatan CPU sebanyak 53,33% responden setuju bahwa kecepatan CPU sudah baik. Persentase skor jawaban mengenai kecepatan CPUsebesar 73,33% termasuk dalam kategori baik.Sedangkan persentase indikator pengolahan sebesar 72,67%, artinya perangkat keras untuk pengolahan informasi di sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah berjalan dengan baik.

Tentang perangkat keras *input mouse* pada komputer, paling banyak responden sependapat bahwa *mouse* yang digunakan cukup baik, yaitu sebesar 53,33%. Kemudian persentase skor jawaban responden sebesar 70,67% berada pada interval 68,01–84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Selanjutnya mengenai perangkat keras *input keyboard* pada komputer, paling banyak responden sependapat bahwa *keyboard* yang digunakan sudah baik, yaitu sebesar 53,33%. Kemudian persentase skor jawaban responden yang sependapat bahwa *keyboard* yang digunakan sudah baik sebesar 76% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase indikator *input* sebesar 73,34% memberikan gambaran bahwa perangkat keras *input* di sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah berjalan dengan baik.

Skor total pada dimensi *hardware* yang terdiri dari 3 indikator (*output,* pengolahan, *input*) yaitu sebesar 73,78%, itu artinya bahwa perangkat keras di

sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I berada dalam kondisi yang baik.

4.3.1.2 Dimensi *Software*

Dimensi *software* dibagi menjadi 2 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi *software*.

Tabel 4.6
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Software*

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Sistem Operasi	7	Sistem operasi yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor	F	0	0	15	9	6	74
			%	0	0	50	30	20	
	8	Kenyamanan sistem operasi	F	0	0	11	16	3	74,67
			%	0	0	36,67	53,33	10	
Total Skor Sistem Operasi									**74,34**
Perangkat Lunak Aplikasi	9	Aplikasi sistem yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor	F	0	0	15	13	2	71,33
			%	0	0	50	43,33	6,67	
	10	Kenyamanan aplikasi sistem	F	0	0	16	10	4	72
			%	0	0	53,33	33,33	13,34	
Total Skor Aplikasi Sistem									**71,67**
Total Skor Dimensi *Software*									**75,51**

Pada tabel 4.6 dapat dilihat paling banyak responden menilai bahwa sistem operasi yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor cukup baik, yaitu sebesar 50%, kemudian ada sebanyak 30% responden yang menilai sistem operasi sudah baik untuk menunjang pekerjaan di kantor. Persentase skor jawaban responden sebesar 74% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk kenyamanan sistem operasi, sebesar 53,33% responden menjawab tidak sering terjadi *error* dalam pengoperasian, kemudian ada sebanyak 36,67% responden menjawab cukup sering terjadi *error*. Persentase skor jawaban responden kenyamanan sistem operasi sebesar 74,67% termasuk

dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator sistem operasi sebesar 74,34% memberikan gambaran bahwa sistem operasi pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

Mengenai indikator aplikasi sistem dapat dilihat responden paling banyak menilai bahwa aplikasi sistem yang dipakai untuk menunjang pekerjaan di kantor cukup baik, yaitu sebesar 50%, kemudian ada sebanyak 43,33% responden yang menilai sistem operasi sudah baik untuk menunjang pekerjaan di kantor. Persentase skor jawaban responden sebesar 71,33% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik.Sedangkan untuk kenyamanan aplikasi sistem, sebesar 53,33% responden menjawab cukup sering terjadi *error* dalam pengoperasian, kemudian ada sebanyak 33,33% responden menjawab tidak sering terjadi *error*. Persentase skor jawaban responden mengenai kenyamanan aplikasi sistem sebesar 72% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator sistem operasi sebesar 71,67% memberikan gambaran bahwa aplikasi sistem pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

Skor total pada dimensi *software* yang terdiri dari 2 indikator (sistem operasi dan aplikasi sistem) yaitu sebesar 75,51%, itu artinya bahwa perangkat lunak di sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I berada dalam kondisi yang baik.

4.3.1.3 Dimensi *Brainware*

Dimensi brain*ware* terdiri 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi *brainware*.

Tabel 4.7
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Brainware*

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Pengguna Sistem Operasi	11	Cara pengoperasian sistem	F	0	0	11	15	4	75,33
			%	0	0	36,67	50	13,33	
	12	Penyelesaian pekerjaan di kantor per harinya	F	0	0	9	17	4	76,67
			%	0	0	30	56,67	13,33	
Total Skor Pengguna Aplikasi Sistem									**76**
Total Skor Dimensi *Software*									**76**

Pada tabel 4.7 dapat dilihat bahwa jawaban paling banyak yaitu responden sudah paham bagaimana cara mengoperasikan sistem, yaitu sebesar 50%. Persentase skor jawaban responden sebesar 75,33% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk penyelesaian pekerjaan di kantor per harinya, sebesar 56,67% responden menjawab banyak pekerjaan yang diselesaikan setiap harinya. Persentase skor jawaban responden dalam menyelesaikan pekerjaan per harinya sebesar 76,67% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator pengguna sistem operasi dan dimensi *brainware* sebesar 76% memberikan gambaran bahwa *brainware* pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah paham dengan cara menjalankan sistem, yang artinya *brainware* sudah baik.

4.3.1.4 Dimensi Prosedur

Dimensi prosedur dibagi menjadi 2 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi prosedur.

Tabel 4.8
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi Prosedur

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Aktivitas	13	Aktivitas sistem berjalan dengan baik	F	0	1	9	15	5	76
			%	0	3,33	30	50	16,67	
	14	Proses dalam menjalankan sistem	F	0	0	11	17	2	84
			%	0	0	36,67	56,67	6,66	
Total Skor Aktivitas									**80**
Fungsi	15	Sistem informasi yang dijalankan berdasarkan SOP	F	0	1	11	14	4	74
			%	0	3,33	36,67	46,67	13,33	
	16	SOP yang sudah ada diperlukan perubahan	F	0	0	3	14	13	86,67
			%	0	0	10	46,67	43,33	
Total Skor Fungsi									**80,34**
Total Skor Dimensi Prosedur									**80,17**

Pada tabel 4.8 dapat dilihat paling banyak responden setuju bahwa aktivitas sistem sudah berjalan dengan baik, yaitu sebesar 50%, kemudian ada sebanyak 30% responden yang cukup setuju bahwa aktivitas sistem berjalan baik. Persentase skor jawaban responden sebesar 76% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk proses dalam menjalankan sistem, sebesar 56,67% responden menjawab tidak ada hambatan dalam menjalankan sistem. Persentase skor jawaban responden dalam hambatan menjalankan sistem sebesar 84% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator aktivitas yaitu sebesar 80% memberikan gambaran bahwa aktivitas dalam menjalankan sistem informasi pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

Mengenai indikator fungsi yang menyatakan bahwa sistem informasi yang dijalankan berdasarkan SOP, responden paling banyak menjawab setuju, yaitu sebesar 46,67%. Kemudian ada sebanyak 36,67% responden yang menjawab cukup setuju. Persentase skor jawaban responden sebesar 74% berada pada interval 68,01-84,00% dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan untuk perubahan pada SOP, sebesar 46,67% responden menjawab tidak perlu dilakukan perubahan, bahkan sebanyak 43,33% responden menjawab sangat tidak perlu dilakukan perubahan pada SOP. Persentase skor jawaban responden mengenai perubahan pada SOP sebesar 86,67% termasuk dalam kategori sangat baik. Sedangkan persentase untuk indikator fungsisebesar 80,34% memberikan gambaran bahwa fungsi dalam menjalankan sistem operasi pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

Skor total pada dimensi prosedur yang terdiri dari 2 indikator (aktivitas dan fungsi) yaitu sebesar 80,17%, itu artinya bahwa prosedur di sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Isudah berjalan dengan baik.

4.3.1.5 Dimensi *Database*

Dimensi *database* dibagi menjadi 2 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 4 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi media penyimpanan data.

Tabel 4.9
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi *Database*

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Media Penyimpanan Data	17	Kapasitas tempat penyimpanan data di kantor	F	0	5	13	11	1	65,33
			%	0	16,67	43,33	36,67	3,33	
	18	Keamanan tempat penyimpanan data	F	2	8	8	9	3	62
			%	6,66	26,67	26,67	30	10	

Total Skor Media Penyimpanan Data									**63,67**
Sistem Pengolahan	19	Proses mengolah data	F	0	0	19	9	2	68,67
			%	0	0	63,33	30	6,67	
	20	Kesalahan dalam mengolah data	F	0	0	12	16	2	73,33
			%	0	0	40	52,33	6,67	
Total Skor Sistem Pengolahan									**71**
Total Skor Dimensi *Database*									**67,34**

Pada tabel 4.9 dapat dilihat paling banyak responden menjawab kapasitas tempat penyimpanan data cukup besar, yaitu 43,33%. Persentase responden yang menjawab mengenai kapasitas tempat penyimpanan data yaitu sebesar 65,33% berada pada interval 52,01%-68,00% dan berada pada kategori cukup baik. Sedangkan responden paling banyak menjawab bahwa keamanan tempat penyimpanan data sudah aman, yaitu sebesar 30%, kemudian ada responden yang menjawab cukup aman dan aman masing-masing sebanyak 26,67%. Persentase skor jawaban responden sebesar 62% termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan persentase untuk indikator media penyimpanan datasebesar 63,67% memberikan gambaran bahwa media penyimpanan data pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah cukup baik.

Mengenai indikator sistem pengolahan, responden yang menjawab cukup banyak hambatan merupakan yang terbanyak, yaitu sebesat 63,33%. Persentase responden yang menjawab mengenai kapasitas tempat penyimpanan data yaitu sebesar 68,67% berada pada kategori baik. Sedangkan untuk kesalahan dalam mengolah data sebanyak 52,33% menjawab sedikit kesalahan yang terjadi dalam mengolah data. Persentase skor jawaban responden sebesar 73,33% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator media penyimpanan data sebesar 71% memberikan gambaran bahwa sistem pengolahan pada sebagian

besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah berjalan dengan baik.

Skor total pada dimensi *database* yang terdiri dari 2 indikator (media penyimpanan data dan sistem pengolahan) yaitu sebesar 67,34%, itu artinya bahwa *database* di sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I berada dalam kondisi yang cukup baik.

Data ini menunjukkan kesesuaian dengan dua fenomena yang terjadi, yang pertama yaitu menurut Edward Hermawan (2010) tidak ketatnya pengamanan tempat penyimpanan data menjadi suatu masalah pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Cicadas Bandung. Andhi Harduka, yang mantan Pelaksana Seksi PPh Badan dan Seksi PPN di KPP Bandung Cicadas dijadikan terdakwa kasus pencurian dokumen pajak karena dianggap merugikan negara. Di dalamnya penyidik PPNS pajak menemukan dokumen pajak. Padahal berkas dokumen pajak yang merupakan rahasia negara tidak boleh dibawa pulang kecuali atas izin dari kepala kantor yang bersangkutan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian, yaitu indikator tempat penyimpanan data sebesar 62% yang termasuk ke dalam cukup baik, masih ada 38% selisih untuk mencapai ideal

Fenomena yang kedua yaitu terjadinya masalah makelar kasus pajak karena integritas sistem yang belum baik. (Anwar Supriyadi, 2010). Pada data penilitian, secara keseluruhan memang sistem informasi memang termasuk ke dalam kategori baik, yaitu sebesar 73,33%, namun itu tidak cukup karena pertama kategori baik saja belum cukup, masih ada selisih 26,67% untuk mencapai ideal. Selain itu indikator media penyimpanan data termasuk ke dalam kategori kurang

baik, yaitu sebesar 63,67%, karena menurut Kepala Kanwil DJP Jatim I Ken Dwi Jugiasteadi (2010) untuk mengatasi masalah markus pajak dan IT diperlukan integritas seluruh sistem.

4.3.1.6 Dimensi Teknologi Jaringan Komunikasi

Dimensi teknologi jaringan komunikasi terdiri 1 indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 2 butir pernyataan. Berikut distribusi tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada dimensi teknologi jaringan komunikasi.

Tabel 4.10
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Dimensi teknologi jaringan komunikasi

Indikator	No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
				1	2	3	4	5	
Jaringan Berdasarkan Geografi	21	Jaringan komunikasi dengan SIDJP terhubung dengan baik	F	0	0	13	15	2	72,67
			%	0	0	43,33	50	6,67	
	22	Jaringan komunikasi antar hardware (PC dengan PC atau dengan *printer*) terhubung dengan baik	F	0	0	14	11	5	74
			%	0	0	46,67	36,67	16,66	
Total Skor Jaringan Berdasarkan Geografi									**73,34**
Total Skor Dimensi Teknologi Jaringan Komunikasi									**73,34**

Pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa sebanyak 50% responden setuju bahwajaringan komunikasi dengan SIDJP terhubung dengan baik. Persentase skor jawaban responden sebesar 72,67% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan pada pernyataan jaringan komunikasi antar hardware (PC dengan PC atau dengan *printer*) terhubung dengan baik sebanyak 46,67% menjawab cukup setuju. Persentase skor jawaban responden sebesar 73,34% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator jaringan berdasarkan geografi sebesar 73,34% memberikan gambaran bahwa teknologi jaringan komunikasi pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah berjalan dengan baik.

Berdasarkan tabel tanggapan perdimensi di atas, tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada dimensi *hardware, software, brainware,* prosedur, dan teknologi jaringan komunikasi berada pada interval 68,01–84,00% yang termasuk dalam kategori baik. Hanya dimensi *database* yang berada pada interval 52,01–68,00% yang termasuk dalam kategori cukup baik.

4.3.2 Analisis Deskriptif Kebijakan Pajak

Pada penelitian ini teknologi informasi diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan.Untuk mengetahui gambaran empirik secara menyeluruh tentang kebijakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat Imaka dilakukan perhitungan persentase skor jawaban responden pada setiap butir pernyataan. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh hasil seperti tampak dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.11
Rekapitulasi Persentase Skor Jawaban Responden Mengenai Kebijakan Pajak

No	Indikator	Skor Aktual	Skor Ideal	% Skor Aktual	Kriteria
1	Tujuan	193	300	64,33	Cukup
2	Program	221	300	73,67	Baik
3	Keputusan	219	300	73	Baik
4	Efek	214	300	71,33	
	Total	**847**	**1200**	**70,58**	**Baik**

(Sumber : Hasil Pengolahan Data, 2012)

Pada tabel 4.11 diatas dapat dilihat bahwa hasil perhitungan persentase total skor tanggapan responden pada variabel kebijakan pajaksebesar 70,58 berada di antara interval 68,01–84,00%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak yang dijalankan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I secara umum sudah baik. Persentase tertinggi terdapat pada indikator keputusan, yaitu sebesar 73% yang berarti termasuk ke dalam kategori

baik. Sedangkan persentase terendah terdapat pada indikator tujuan, yaitu sebesar 64,33% yang berarti termasuk ke dalam kategori cukup baik.

Agar lebih jelas penulis juga akan menyajikan tanggapan responden mengenai kebijakan pajak pada masing-masing indikator, yang diukur menggunakan 4 (empat) indikator dan dioperasionalisasikan menjadi 8 butir pernyataan. Berikut gambaran tanggapan responden terhadap setiap butir pernyataan pada masing-masing indikator.

4.3.2.1 Indikator Tujuan

Tabel 4.12
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Tujuan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
			1	2	3	4	5	
23	Kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan visi misi DJP	F	0	7	10	11	2	65,33
		%	0	23,33	33,33	36,67	6,67	
24	Perlunya perubahan kebijakan perpajakan yang dijalankan untuk menunjang visi misi DJP	F	0	9	9	10	2	63,33
		%	0	30	30	33,33	6,67	
Total Skor Tujuan								**64,33**

Pada tabel 4.12 dapat dilihat paling banyak responden menjawab setuju bahwa kebijakan perpajakan yang dibuat pemerintah sudah sesuai dengan visi misi DJP, yaitu sebesar 36,67%. Persentase responden yang menjawab mengenai kesesuaian kebijakan perpajakan dengan visi misi DJP yaitu sebesar 65,33% berada pada interval 52,01%-68,00% dan berada pada kategori cukup baik. Sedangkan mengenai perlunya perubahan kebijakan perpajakan yang dijalankan untuk menunjang visi misi DJP, responden paling banyak menjawab bahwa tidak perlu dilakukan perubahan kebijakan perpajakan, yaitu sebesar 33,33%. Persentase skor jawaban responden sebesar 63,33% termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan persentase untuk indikator tujuan sebesar 64,33%

memberikan gambaran bahwa tujuan kebijakan perpajakan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah cukup sesuai dengan visi misi DJP.

Data ini menunjukkan kesesuaian dengan fenomena yang terjadi, yaitu adanya saling tolak belakang antara fungsi yakni fungsi *budgeter* (menghimpun penerimaan sebesar-besarnya untuk mendanai jalannya pemerintahan) dan fungsi regulasi (mengatur) (Mohammad Tjiptardjo, 2010). Jika fungsi regulasi yang diutamakan, maka artinya ada ongkos yang harus ditanggung pemerintah, karena ada sebagian pendapatan perpajakan yang dikorbankan. Apabila pemerintah ingin mendorong pertumbuhan sektor industri, maka ada insentif yang diberikan, biasanya dalam bentuk keringanan pajak. Langkah ini diharapkan akan mendorong kesehatan keuangan korporasi, namun penerimaan negara akan terpangkas (Mohammad Tjiptardjo, 2010). Total skor indikator tujuan pada penelitian sebesar 64,33% yang masuk kategori cukup menunjukkan bahwa masih ada selisih sebesar 35,67% untuk mencapai ideal.

4.3.2.2 Indikator Program

Tabel 4.13
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Program

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
			1	2	3	4	5	
25	Program-program di KPP yang telah direncanakan sudah terealisasi	F	0	0	12	15	3	74
		%	0	0	40	50	10	
26	Perlunya perubahan program di KPP untuk menunjang visi misi DJP	F	0	0	11	18	1	73,33
		%	0	0	36,67	60	3,33	
Total Skor Program								**73,67**

Pada tabel 4.13 dapat dilihat paling banyak responden menjawab setuju bahwa program-program di KPP yang telah direncanakan sudah terealisasi, yaitu sebesar 50%. Persentase responden yang menjawab mengenai kesesuaian

kebijakan perpajakan dengan visi misi DJP yaitu sebesar 74% berada pada interval 68,01%-84,00% dan berada pada kategori baik. Sedangkan mengenai perlunya perubahan program di KPP untuk menunjang visi misi DJP, responden paling banyak menjawab bahwa tidak perlu dilakukan perubahan kebijakan perpajakan, yaitu sebesar 60%. Persentase skor jawaban responden sebesar 73,33% termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan persentase untuk indikator program sebesar 73,67% memberikan gambaran bahwa program kebijakan perpajakan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah sesuai dengan visi misi DJP.

4.3.2.3 Indikator Keputusan

Tabel 4.14
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Keputusan

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
			1	2	3	4	5	
27	Keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan sudah tepat sasaran	F	0	0	14	15	1	71,33
		%	0	0	46,67	50	3,33	
28	Keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan membuat pegawai bekerja dengan nyaman	F	0	0	11	16	3	74,67
		%	0	0	36,67	53,33	10	
Total Skor Keputusan								**73**

Pada tabel 4.14 dapat dilihat paling banyak responden menjawab setuju bahwa keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan sudah tepat sasaran, yaitu sebesar 50% dan sebanyak 46,67% responden menjawab cukup setuju. Persentase responden yang menjawab mengenai kesesuaian kebijakan perpajakan dengan visi misi DJP yaitu sebesar 71,33% berada pada interval 68,01%-84,00% dan berada pada kategori baik. Sedangkan responden paling banyak menjawab setuju bahwa keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan membuat pegawai bekerja dengan nyaman, yaitu sebesar 53,33%. Persentase skor jawaban

responden sebesar 74,67% termasuk dalam kategori cukup baik. Sedangkan persentase untuk indikator program sebesar 73% memberikan gambaran bahwa keputusan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sudah baik.

4.3.2.4 Indikator Efek

Tabel 4.15
Rekapitulasi Tanggapan Responden Pada Indikator Efek

No	Pernyataan		Alternatif Jawaban					% Skor
			1	2	3	4	5	
27	Kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan penerimaan sesuai target	F	0	2	11	15	2	71,33
		%	0	6,67	36,66	50	6,67	
28	Akibat dari kebijakan pajak yang dikeluarkan telah meningkatkan penerimaan pajak	F	0	2	11	15	2	71,33
		%	0	6,67	36,66	50	6,67	
Total Skor Efek								**71,33**

Pada tabel 4.15 dapat dilihat paling banyak responden menjawab setuju bahwa kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan penerimaan sesuai target, yaitu sebesar 50%. Persentase responden yang menjawab mengenai kebijakan pajak yang dikeluarkan pemerintah mengakibatkan penerimaan sesuai target yaitu sebesar 71,33% berada pada interval 68,01%-84,00% dan berada pada kategori baik. Sedangkan responden paling banyak menjawab setuju bahwa akibat dari kebijakan pajak yang dikeluarkan telah meningkatkan penerimaan pajak, yaitu sebesar 50%. Persentase skor jawaban responden sebesar 71,33% termasuk dalam kategori baik. Sedangkan persentase untuk indikator efek sebesar 71,33% memberikan gambaran bahwa akibat yang ditimbulkan pemerintah mengenai kebijakan perpajakan pada sebagian besar Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I yaitu membuat penerimaan pajak sesuai target dan telah meningkatkan penerimaan pajak.

Berdasarkan tabel tanggapan per indikator di atas, tampak bahwa persentase skor tanggapan responden pada indikator program, keputusan dan efek berada pada interval 68,01–84,00% yang termasuk dalam kategori baik. Hanya indikator tujuan yang berada pada interval 52,01–68,00% yang termasuk dalam kategori cukup baik.

4.3.3 Analisis Deskriptif Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak diproksi dari rasio realisasi penerimaan terhadap target penerimaan. Berikut gambaran penerimaan pajak pada masing-masing Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I.

Tabel 4.16
Penerimaan Pajak

No	Nama KPP	Target 2011	Realisasi 2012	Pencapaian
1	KPP Pratama Cimahi	Rp 646.607.933.599	Rp 671.783.653.279	103,9%
2	KPP Pratama Bandung Tegallega	Rp 419.373.066.424	Rp 389.669.599.979	92,9%
3	KPP Pratama Bandung Cibeunying	Rp 967.660.473.599	Rp 895.069.433.056	92,5%
4	KPP Pratama Bandung Karees	Rp 777.712.352.401	Rp 671.011.824.580	86,3%
5	KPP Pratama Bandung Bojonagara	Rp 581.587.604.967	Rp 652.123.661.520	112,1%
6	KPP Pratama Bandung Cicadas	Rp 592.923.922.852	Rp 580.566.214.032	97,9%
7	KPP Pratama Purwakarta	Rp 758.273.245.944	Rp 724.720.670.433	95,6%
8	KPP Pratama Cianjur	Rp 334.441.051.533	Rp 310.357.257.840	92,8%
9	KPP Pratama Soreang	Rp 521.634.138.579	Rp 555.364.684.418	106,5%
10	KPP Pratama Sumedang	Rp 197.470.812.516	Rp 219.056.266.341	110,9%
	TOTAL	**Rp 5.797.684.602.414**	**Rp 5.669.723.265.478**	**97,79%**

Pada tabel 4.16 dapat diketahui secara total pencapaian target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil Jawa Barat I sebesar 97,79%. Pencapaian tertinggi penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Bojonagara, yaitu mencapai 112,1%. Sebaliknya pencapaian terendah penerimaan pajak di KPP Pratama Bandung Karees, yaitu hanya mencapai 86,3%.

Total penerimaan pajak yang tidak sesuai target, yaitu realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 tidak mencapai sasaran target pemerintah Rp Rp 878,7 triliun. Realisasi mencapai Rp 872,6 triliun atau 99,3% dari target, kurang 'tipis' Rp 6 triliun.Walaupun kurang tipis, tapi tetap saja disayangkan karena tidak sesuai dengan target yang diharapkan(Agus Martowardojo, 2012).

4.4 Analisis Verifikatif

a. Uji Normalitas

Asumsi normalitas merupakan persyaratan yang sangat penting pada pengujian kebermaknaan (signifikansi) koefisien regresi, model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal, sehingga layak dilakukan pengujian secara statistik. Pada penelitian ini digunakan uji satu sampel *Kolmogorov Smirnov* untuk menguji normalitas model regresi.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji normalitas yaitu sebagai berikut :

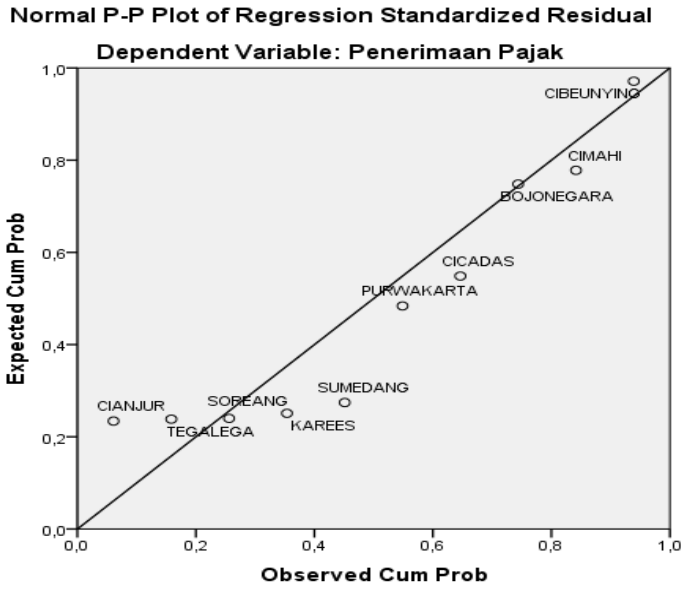
Tabel 4.17
Test of Normality
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		10
Normal Parameters[a,b]	Mean	,0000793
	Std. Deviation	153070646610,07596000
Most Extreme Differences	Absolute	,252
	Positive	,252
	Negative	-,205
Kolmogorov-Smirnov Z		,796
Asymp. Sig. (2-tailed)		,550

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Karena nilai asymp.*Sig. (2-tailed) kolmogorov smirnov* untuk *Standardized Residual* sebesar 0,550 lebih besar dari 0,05 (0,550 > 0,05) maka H_o diterima artinya data *Standardized* menyebar secara normal.

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *Normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 4.2
Grafik Nomal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik tidak menyebar di sekitar gari diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.

b. Uji Multikolonieritas

Multikolinieritas berarti adanya hubungan yang kuat di antara beberapa atau semua variabel bebas pada model regresi. Jika terdapat Multikolonieritas maka koefisien regresi menjadi tidak tentu, tingkat kesalahannya menjadi sangat besar

dan biasanya ditandai dengan nilai koefisien determinasi yang snagat besar, tetapi pada pengujian parsial koefisien regresi yang signifikan. Pada penelitian ini digunakan nilai *variance inflation factors* (VIF) sebagai indikator ada tidaknya multikolonieritas diantara variabel bebas.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji multikolonieritas yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.18
Test of Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Sistem Informasi	,997	1,003
	Kebijakan Pajak	,997	1,003

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak
Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Karena nilai VIF untuk Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak bernilai 1,003 pada kondisi < 10. Tingkat ketelitian 0,05 maka H_0 diterima atau tidak terdapat hubungan yang linear diantara variabel independen yang ada pada model regresi, sehingga kekhawatiran akibat multikolonieritas dapat dihindari. Artinya jika tidak terdapat multikolonieritas maka koefisien regresi relative pasti tingkat kesalahannya kecil.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan uji-rank Spearman yaitu dengan mengkorelasikan masing-masing

variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual. Apabila koefisien regresi dari masing-masing variabel independen ada yang signifikan pada tingkat kekeliruan 5%, mengindikasikan adanya heteroskedastisitas. Pada tabel 4.19 berikut dapat dilihat nilai signifikansi masing-masing koefisien regresi variabel bebas terhadap nilai absolut dari residual (*Unstandardized Residual*).

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji heteroskedastisitas yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.19
Test of Heteroskedastisitas
Correlations

			Sistem Informasi	Kebijakan Pajak	Unstandardized Residual
Spearman's rho	Sistem Informasi	Correlation Coefficient	1,000	,067	,200
		Sig. (1-tailed)	.	,427	,290
		N	10	10	10
	Kebijakan Pajak	Correlation Coefficient	,067	1,000	,212
		Sig. (1-tailed)	,427	.	,278
		N	10	10	10
	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	,200	,212	1,000
		Sig. (1-tailed)	,290	,278	.
		N	10	10	10

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Karena korelasi Sistem Informasi terhadap *Unstandardized Residual* bernilai 0,290 lebih besar dari 0,05 dan Kebijakan Pajak terhadap *Unstandardized Residual* bernilai 0,278 lebih besar dari 0,05 maka H_1 ditolak, artinya tidak ada heteroskedastisitas (variance) antara variabel independen dan nilai absolut dari residualnya pada model regresi.

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik autokorelasi yaitu korelasi yang terjadi antara residual pada satu pengamatan dengan pengamatan lain pada model regresi.

Prasyarat yang harus terpenuhi adalah tidak adanya autokorelasi dalam model regresi.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji autokorelasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.20
Test of Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,667[a]	,445	,287	173565798837,477	1,314

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Sistem Informasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Dari hasil output di atas didapat nilai D-W yang dihasilkan dari model regresi adalah 1,314. Sedangkan dari tabel D-W dengan signifikansi 0,05 dan jumlah data (n) = 10, serta jumlah variabel independen (k) = 2 diperoleh nilai d_L sebesar 0,697 dan d_U sebesar 1,641 (lihat lampiran tabel Durbin-Watson). Karena nilai D-W (1,314) berada pada daerah antara d_L dan d_U, maka tidak ada kesimpulan, artinya data dalam model regresi berada pada daerah keragu-raguan. Oleh karena itu akan dilanjutkan dengan melakukan *run test*.

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil uji autokorelasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.21
Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value[a]	,0000793
Cases < Test Value	6
Cases >= Test Value	4
Total Cases	10
Number of Runs	6
Z	,000
Asymp. Sig. (2-tailed)	1,000

a. Mean

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Dari hasil output *run test* di atas dapat dilihat signifikansi uji Z (1.000) masih lebih besar dari 0,05 yang mengindikasikan tidak terdapat autokorelasi pada model regresi.

Karena keempat asumsi regresi sudah terpenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa hasil regresi variabel Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak memenuhi syarat BLUE (Best Linear Unbias Estimation) sehingga kesimpulan yang diperoleh dari model regresi dapat dianggap sudah menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

4.5.1 Pengaruh Sistem Informasi terhadap Penerimaan Pajak

a. Analisis Korelasi Parsial

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yang akan dicari hubungannya, yaitu antara variabel independen (X_1), Sistem Informasi yang diduga memiliki hubungan dengan penerimaan pajak sebagai variabel dependen (Y). Korelasi antara sistem informasi dengan penerimaan pajak dihitung menggunakan korelasi *product moment* menghasilkan nilai korelasi (R) 0,667. Dengan menggunakan

perhitungan secara terkomputerisasi yaitu menggunakan SPSS 20.0 *for windows* dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini :

Tabel 4.22
Koefisien Korelasi Parsial Sistem Informasi terhadap Penerimaan Pajak

Correlations

		Sistem Informasi	Penerimaan Pajak
Sistem Informasi	Pearson Correlation	1	,667*
	Sig. (1-tailed)		,018
	N	10	10
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	,667*	1
	Sig. (1-tailed)	,018	
	N	10	10

*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

b. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.22 korelasi sistem informasi dan penerimaan pajak dalam kategori kuat. Karena berada pada interval koefisien 0,60-0,799. Nilai r tersebut berarti bahwa hubungan antara sistem informasi pajak dan penerimaan pajak bersifat positif, maksudnya jika semakin baik sistem informasi maka penerimaan pajak diprediksi akan mengalami peningkatan. Kemudian besar pengaruh sistem informasi terhadap penerimaan pajak di 10 KPP Kanwil DJP Jabar I ketika sistem informasi tidak berubah adalah 0,667 artinya memiliki pengaruh kuat terhadap penerimaan pajak.

Dalam peningkatan sistem informasi pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jabar I perlu mempertimbangkan indikator variabel sistem informasi yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Dimensi *database* terutama pada indikator media penyimpanan data yang masih berada pada kategori cukup baik perlu ditingkatkan lagi, sehingga

kapasitas *database* bisa menampung lebih banyak data dan arsip, selain itu keamanan dan kerahasiaan data pun bisa lebih terjamin.

2. Dimensi *software, hardware, brainware,* prosedur dan teknologi jaringan komunikasi pun perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai ideal, sehingga sistem informasi di KPP bisa terintegrasi dengan baik.

Berdasarkan hasil uji regresi berganda diperoleh koefisien arah garis sistem informasi terhadap penerimaan pajak sebesar 18487965228,308. Karena koefisien arah garis sistem informasi (18487965228,308) tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa sistem informasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jabar I. Artinya semakin meningkat sistem informasi maka akan meningkat pula penerimaan pajak pada KPP.

4.5.2 Pengaruh Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

a. Analisis Korelasi Parsial

Korelasi parsial variabel independen (X_2) kebijakan pajak terhadap (Y) penerimaan pajak menghasilkan nilai korelasi (r) 0,048. Dengan menggunakan perhitungan secara komputerisasi yaitu menggunakan SPSS 20.0 *for windows* dapat dijelaskan seperti tabel dibawah ini:

Tabel 4.23
Koefisien Korelasi Parsial Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

Correlations

		Kebijakan Pajak	Penerimaan Pajak
Kebijakan Pajak	Pearson Correlation	1	,048
	Sig. (1-tailed)		,448
	N	10	10
Penerimaan Pajak	Pearson Correlation	,048	1
	Sig. (1-tailed)	,448	
	N	10	10

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

b. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.23 korelasi kebijakan pajak dan penerimaan pajak termasuk ke dalam kategori sangat rendah karena berada pada interval 0,00-0,199. Nilai r tersebut berarti menunjukkan bahwa hubungan antara kebijakan pajak dan penerimaan pajak bersifat positif, maksudnya jika kebijakan pajak semakin baik maka penerimaan pajak semakin meningkat. Kemudian besar pengaruh kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak di 10 KPP Kanwil DJP Jabar I adalah yang artinya kebijakan pajak pengaruhnya sangat rendah terhadap penerimaan pajak.

Dalam peningkatan kebijakan pajak pada KPP Pratama di Kanwil DJP Jabar I perlu mempertimbangkan indikator variabel kebijakan pajak yang dinyatakan perlu ditingkatkan yaitu :

1. Indikator tujuan yang masih berada pada kategori cukup baik perlu ditingkatkan lagi, sehingga kebijakan perpajakan yang dijalankan dapat sejalan dengan visi misi DJP.
2. Indikator program, keputusan dan efek pun perlu lebih ditingkatkan lagi untuk mencapai ideal, sehingga kebijakan pajak pada KPP dapat berjalan dengan sesuai yang diharapkan.

Berdasarkan analisis regresi berganda diperoleh koefisien arah garis kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak sebesar 660827936,425. Karena koefisien arah garis sistem informasi (660827936,425) tidak sama dengan nol, maka H_0 ditolak dan H_a diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama di

Kanwil DJP Jabar I. Artinya semakin meningkat kebijakan pajak maka akan meningkat pula penerimaan pajak pada KPP.

Hal ini tentu diharapkan agar bisa sejalan dengan visi misi DJP. Visi DJP yaitu menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi. Sedangkan misi DJP yaitu menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-undang Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administasi perpajakan yang efektif dan efisien.

4.5.3 Pengaruh Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak terhadap Penerimaan Pajak

a. Analisis Korelasi Simultan

Korelasi simultan antara sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak dihitung menghasilkan nilai korelasi (R) 0,667. Dengan menggunakan perhitungan secara terkomputerisasi menggunakan SPSS 20.0 *for windows* yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.24
Korelasi Simultan Sistem Informasi dan Kebijakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,667[a]	,445	,287	173565798837,477

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Sistem Informasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

b. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil analisis regresi linier berganda yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.25
Analisis Regresi Linier Berganda
Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-364817100717,618	508285444149,929		-,718	,496
	Sistem Informasi	18487965228,308	7817284112,574	,667	2,365	,050
	Kebijakan Pajak	660827936,425	18967279474,316	,010	,035	,973

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

Dari hasil analisis regresi linier berganda diatas diperoleh nilai *constant* sebesar -364817100717,618. Nilai koefisien arah garis (b_1) untuk X_1 sebesar 18487965228,308 dan nilai koefisien arah garis (b_2) untuk X_2 sebesar 660827936,425 maka persamaan regresinya adalah sebagai berikut:

$$Y = -364817100717,618 + 18487965228,308\ X_1 + 660827936,425\ X_2$$

c. Koefisiensi Determinasi

Nilai koefisien determinasi variabel sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak dapat dilihat dari R *Square* = 0,445 artinya kedua variabel tersebut bekerja simultan mempengaruhi sebesar 0,445 x 100% = 44,5% terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan pengolahan data menggunakan software SPSS 20.0 *for windows* maka hasil analisis koefisien determinasi yaitu sebagai berikut :

Tabel 4.26
***Model Summary* Koefisien Determinasi**

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,667[a]	,445	,287	173565798837,477

a. Predictors: (Constant), Kebijakan Pajak, Sistem Informasi

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

Sumber: Data Primer yang telah diolah, 2012

d. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.24, diperoleh nilai koefisien korelasi simultan (r) sebesar 0,667. Koefisien korelasi (r) memiliki nilai positif (+) dimana r = +1 atau mendekati +1 maka terdapat hubungan yang kuat dan searah antara variabel Sistem Informasi ($X_{1)}$, Kebijakan Pajak ($X_{2)}$ dan Penerimaan Pajak (Y).

Artinya secara simultan sistem informasi dan kebijakan pajak berpengaruh positif (+). Dimana jika secara simultan sistem informasi dan kebijakan pajak meningkat maka penerimaan pajak akan meningkat pula. Pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak termasuk ke dalam kategori kuat karena berada pada interval 0,60-0,799.

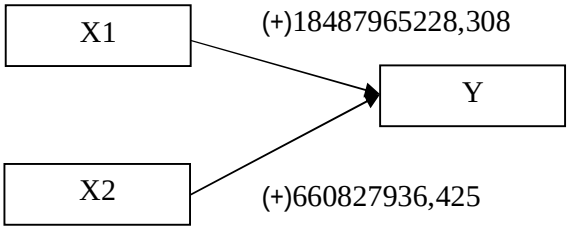
Sedangkan berdasarkan tabel 4.25 dari persamaan regresi di atas diperoleh nilai konstanta sebesar -364817100717,618, artinya jika sistem informasi (X_1) dan kebijakan pajak (X_2) nilainya adalah 0, maka penerimaan pajak berarti tertunggak sebesar Rp 364.817.100.718,-

Koefisien regresi variabel sistem informasi (X_1) sebesar 18487965228,308, artinya jika variabel kebijakan pajak nilainya tetap dan sistem informasi

mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 18.487.965.228,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara sistem informasi dengan penerimaan pajak. Artinya semakin meningkat sistem informasi maka semakin meningkat penerimaan pajak.

Koefisien regresi variabel kebijakan pajak (X_2) sebesar 660827936,425, artinya jika variabel sistem informasi nilainya tetap dan kebijakan pajak mengalami perubahan sebesar 1% maka penerimaan pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar Rp 660.827.936,-. Koefisien bernilai positif artinya terjadi pengaruh positif antara kebijakan pajak dengan penerimaan pajak. Artinya semakin baik kebijakan pajak maka penerimaan pajak semakin meningkat.

Maka paradigma penelitian yang digunakan adalah paradigma ganda hubungan dua variabel bebas berpengaruh positif dengan satu variabel tergantung yang memiliki pola hubungan variabel sebagai berikut:



Gambar 4.3
Model analisis regresi berganda

Keterangan

X1 = Sistem Informasi

X2 = Kebijakan Pajak

Y = Penerimaan pajak

Berdasarkan tabel 4.26 koefisien determinasi sebesar 44,5% yang berarti pengaruh sistem informasi dan kebijakan pajak terhadap penerimaan pajak termasuk ke dalam kategori sedang. Koefisien determinasi ini juga menunjukkan bahwa perubahan yang terjadi pada penerimaan pajak pada 10 KPP DJP Kanwil Jabar I bisa dipengaruhi oleh sistem informasi pajak dan kebijakan pajak yang baik. Sedangkan sisanya 55,5% dipengaruhi variabel lain di luar variabel sistem informasi dan kebijakan pajak. Faktor-faktor lainnya yaitu seperti kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan wajib pajak (Maria M. Ratnasari & Ni Nyoman Afrianti:2010), penjualan elektronik (Richard R. Hawkins & David R. Epprights : 2000).